

Mekanisme Penerbitan *Invoice* Jasa Tenaga Kerja *Outsourcing* sebagai Sarana Penagihan Piutang Usaha pada PT Putra Gemilang Terate

Muhammad Angga Anggriawan^{1*}, Novi Handayani^{2*}, Putri Farah Agustina^{3*}
^{123*}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa,
Serang, Indonesia
[1*muhammadanggaanggriawan@gmail.com](mailto:muhammadanggaanggriawan@gmail.com), [2*novi.novihndayani@gmail.com](mailto:novi.novihndayani@gmail.com),
[3*farah.ptri050@gmail.com](mailto:farah.ptri050@gmail.com)

Abstract

This study aims to analyze the mechanism of issuing invoices for outsourced labor services as a means of accounts receivable collection at PT Putra Gemilang Terate, as well as to evaluate the effectiveness of procedures implemented in supporting internal control and cash flow stability. The study employed a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through direct observation of administrative activities, semi-structured interviews with the administration and finance departments, and documentation, including attendance records, overtime reports, invoices, and accounts receivable monitoring lists. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, using triangulation techniques to ensure validity and reliability of the information. The results indicate that the invoice issuance mechanism has been carried out systematically through stages of attendance recap, cost calculation according to the employment contract, internal verification, invoice issuance, and recording of accounts receivable in the accounting system. The segregation of duties among personnel responsible for preparation, verification, and recording, along with supporting documentation, has reinforced effective internal control. However, the accounts receivable monitoring process remains semi-manual, potentially causing delays in follow-up collections. This study recommends the development of a digital-based monitoring system or integrated dashboard that provides automatic due date notifications, enabling proactive and efficient collection and supporting company cash flow stability. The findings of this research contribute to the financial management practices of outsourcing companies and strengthen internal control systems.

Keywords: *Invoice; Accounts Receivable; Labor Outsourcing; Internal Control; Cash Flow.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penerbitan *invoice* jasa tenaga kerja *outsourcing* sebagai sarana penagihan piutang usaha pada PT Putra Gemilang Terate serta mengevaluasi efektivitas prosedur yang diterapkan dalam mendukung pengendalian internal dan stabilitas arus kas perusahaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap aktivitas administrasi, wawancara semi-terstruktur dengan bagian administrasi dan keuangan, serta dokumentasi berupa rekap absensi, laporan lembur, *invoice*, dan daftar *monitoring* piutang. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan teknik triangulasi untuk

Article info

Received 22 Februari 2026

Revised 25 Februari 2026

Accepted 28 Februari 2026

farah.ptri050@gmail.com

Copyright©2026. Published by Jurnal Prima Manajemen – Al -Afif

memastikan keabsahan dan reliabilitas informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penerbitan *invoice* telah dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan rekapitulasi absensi, perhitungan biaya sesuai kontrak kerja, verifikasi internal, penerbitan *invoice*, serta pencatatan piutang usaha dalam sistem akuntansi. Pemisahan fungsi antara pihak yang menyusun, memverifikasi, dan mencatat transaksi serta dokumentasi pendukung telah mendukung pengendalian internal yang efektif. Meskipun demikian, proses *monitoring* piutang masih dilakukan secara semi-manual, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam tindak lanjut penagihan. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan sistem *monitoring* piutang berbasis digital atau dashboard terpadu yang mampu memberikan notifikasi jatuh tempo secara otomatis, sehingga penagihan menjadi lebih proaktif, efisien, dan mendukung stabilitas arus kas perusahaan. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi pada praktik manajemen keuangan perusahaan *outsourcing* serta penguatan sistem pengendalian internal.

Kata Kunci: *Invoice*; Piutang Usaha; *Outsourcing* Tenaga Kerja; Pengendalian Internal; Arus Kas.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan sektor jasa di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, khususnya pada bidang penyediaan tenaga kerja *outsourcing*, *general contractor*, dan perdagangan umum. Model bisnis berbasis *outsourcing* semakin banyak digunakan oleh perusahaan karena dinilai mampu meningkatkan efisiensi operasional dan fleksibilitas pengelolaan sumber daya manusia. Namun demikian, peningkatan kompleksitas aktivitas operasional tersebut juga membawa konsekuensi administratif dan keuangan yang tidak sederhana, terutama dalam pengelolaan siklus pendapatan dan penagihan piutang usaha.

Dalam perusahaan jasa, pendapatan utama diperoleh dari layanan yang diberikan kepada klien berdasarkan kontrak kerja sama. Salah satu elemen penting dalam siklus pendapatan adalah penerbitan *invoice* sebagai dokumen resmi penagihan. Secara konseptual, *invoice* tidak hanya berfungsi sebagai alat tagih, tetapi juga sebagai bukti transaksi, dasar pengakuan pendapatan berbasis akrual, serta bagian dari sistem pengendalian internal perusahaan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ketepatan waktu dan akurasi penerbitan *invoice* berpengaruh langsung terhadap efektivitas pengelolaan piutang dan stabilitas arus kas perusahaan (Azizah, 2023).

Kelemahan dalam prosedur penagihan dan dokumentasi *invoice* dapat meningkatkan risiko piutang tak tertagih serta mengganggu likuiditas perusahaan. Studi yang dilakukan oleh Hamdani (2024) menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan piutang sangat dipengaruhi oleh konsistensi prosedur administrasi dan sistem *monitoring* yang terintegrasi. Sementara itu, penelitian Tarizha Zahura (2024) menemukan bahwa lemahnya proses verifikasi *invoice* dan kurangnya pemisahan fungsi dalam sistem pengendalian internal berpotensi menyebabkan keterlambatan pembayaran serta menurunkan kualitas pelaporan keuangan. Temuan tersebut menegaskan bahwa mekanisme penerbitan *invoice* bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian strategis dalam siklus pendapatan perusahaan jasa.

Secara teoritis, mekanisme penerbitan *invoice* merupakan bagian dari sistem pengendalian internal yang bertujuan memastikan keandalan informasi keuangan dan efektivitas operasional. Prosedur tersebut mencakup identifikasi jasa yang telah diberikan, perhitungan biaya sesuai kontrak, penyusunan dokumen tagihan, proses verifikasi dan otorisasi, pencatatan dalam sistem akuntansi, hingga *monitoring* dan tindak lanjut penagihan. Penelitian Yuliani dan Reviandani (2024) menunjukkan bahwa penerapan pengendalian internal yang memadai dalam proses penagihan *outsourcing* mampu meningkatkan ketepatan pembayaran serta meminimalkan risiko kesalahan administratif.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang *general contractor, supplier, service*, dan *general trading*, PT Putra Gemilang Terate memiliki peran strategis dalam menyediakan jasa tenaga kerja *outsourcing* dan pengadaan material bagi berbagai sektor industri. Kompleksitas aktivitas tersebut menuntut adanya sistem administrasi dan keuangan yang terstruktur, khususnya dalam mekanisme penerbitan *invoice* jasa tenaga kerja *outsourcing* sebagai sarana penagihan piutang usaha. Mengingat sebagian besar pendapatan perusahaan berasal dari jasa tersebut, efektivitas prosedur penerbitan *invoice* menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas arus kas dan keberlanjutan usaha.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas sistem pengendalian internal dan manajemen piutang, kajian yang secara spesifik menganalisis mekanisme penerbitan *invoice* jasa tenaga kerja *outsourcing* pada perusahaan jasa skala menengah masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada perusahaan manufaktur atau pada pengelolaan piutang secara umum tanpa mengkaji secara rinci alur administratif dan verifikasi *invoice* dalam konteks *outsourcing* tenaga kerja (Kartikasari, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu ditelaah lebih lanjut, khususnya terkait efektivitas mekanisme penerbitan *invoice* sebagai sarana penagihan piutang usaha dalam perusahaan jasa *outsourcing*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penerbitan *invoice* jasa tenaga kerja *outsourcing* sebagai sarana penagihan piutang usaha pada PT Putra Gemilang Terate serta mengevaluasi efektivitas prosedur yang diterapkan dalam mendukung sistem pengendalian internal dan kelancaran arus kas perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian sistem pengendalian internal pada perusahaan jasa, sekaligus kontribusi praktis bagi manajemen dalam meningkatkan efektivitas sistem penagihan dan pengelolaan piutang.

2. KAJIAN TEORI

2.1 Invoice sebagai Instrumen Penagihan

Invoice merupakan dokumen komersial yang diterbitkan oleh penyedia jasa kepada pelanggan sebagai bukti tagihan atas transaksi yang telah dilakukan. *Invoice* memuat informasi mengenai identitas pihak terkait, rincian jasa, periode transaksi, jumlah tagihan, serta syarat pembayaran. Menurut Rudianto (2018), *invoice* berfungsi sebagai dasar pencatatan piutang usaha dan pengakuan pendapatan dalam sistem akuntansi berbasis akrual.

Penelitian terbaru oleh Rizky Maulana Putra (2024) menemukan bahwa ketidaksesuaian data operasional dengan *invoice* menjadi faktor dominan keterlambatan pembayaran dalam perusahaan jasa *outsourcing*. Oleh karena itu, proses verifikasi internal sebelum *invoice* diterbitkan menjadi bagian penting dalam sistem pengendalian internal.

Dalam perusahaan jasa tenaga kerja *outsourcing*, *invoice* biasanya disusun berdasarkan jumlah tenaga kerja, jumlah hari kerja efektif, lembur (*overtime*), serta komponen biaya lain sesuai kontrak kerja sama. Ketepatan penyusunan *invoice* sangat menentukan efektivitas penagihan serta kualitas pelaporan keuangan perusahaan.

2.2 Piutang Usaha

Piutang usaha merupakan hak perusahaan untuk menerima kas dari pelanggan atas transaksi penjualan jasa secara kredit. Menurut Kasmir (2019), piutang usaha termasuk dalam aset lancar yang sangat memengaruhi tingkat likuiditas perusahaan. Tingginya saldo piutang tanpa pengelolaan yang efektif dapat menimbulkan tekanan terhadap arus kas.

Penelitian Dewi Kartikasari (2023) menunjukkan bahwa perusahaan jasa dengan sistem *monitoring* piutang berbasis digital memiliki tingkat perputaran piutang yang lebih

baik dibandingkan dengan perusahaan yang masih menggunakan sistem manual. Hal ini menunjukkan pentingnya mekanisme pengawasan yang terstruktur dan terintegrasi dalam pengelolaan piutang usaha.

Pengelolaan piutang mencakup kebijakan kredit, pencatatan akurat, *monitoring* jatuh tempo, serta prosedur penagihan yang sistematis. Dalam perusahaan *outsourcing*, piutang timbul setelah *invoice* diterbitkan sesuai termin pembayaran dalam kontrak kerja sama.

2.3 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas keandalan pelaporan keuangan, efektivitas operasional, serta kepatuhan terhadap regulasi. Unsur penting pengendalian internal meliputi pemisahan fungsi, otorisasi transaksi, dokumentasi yang memadai, serta prosedur verifikasi.

Penelitian oleh Yuliani dan Wasti Reviandani (2024) menunjukkan bahwa penerapan pengendalian internal yang baik pada proses penagihan jasa *outsourcing* mampu meningkatkan ketepatan waktu pembayaran serta menurunkan risiko kesalahan administratif.

Dalam mekanisme penerbitan *invoice* jasa tenaga kerja *outsourcing*, pengendalian internal tercermin melalui proses verifikasi data absensi dan lembur, otorisasi sebelum *invoice* diterbitkan, pengarsipan dokumen pendukung, serta *monitoring* piutang secara berkala. Tanpa pengendalian yang memadai, risiko kesalahan perhitungan, duplikasi tagihan, atau keterlambatan penagihan dapat meningkat.

2.4 Outsourcing Tenaga Kerja

Outsourcing merupakan praktik penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerja sama. Dalam konteks ketenagakerjaan, penyedia jasa bertanggung jawab atas administrasi tenaga kerja, sementara tenaga kerja ditempatkan pada perusahaan pengguna (*user*).

Penelitian Andi Pratama (2022) menjelaskan bahwa kompleksitas administrasi dalam perusahaan *outsourcing* terletak pada sinkronisasi data operasional dengan sistem penagihan. Ketidaksesuaian data absensi dan kontrak kerja dapat menyebabkan perbedaan tagihan serta memperlambat proses pembayaran.

Karakteristik *outsourcing* yang berbasis kontrak dan termin pembayaran tertentu menuntut sistem administrasi yang akurat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, mekanisme penerbitan *invoice* dalam perusahaan *outsourcing* tidak hanya berfungsi sebagai alat penagihan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dalam siklus pendapatan perusahaan.

Secara konseptual, tata kelola keuangan sekolah tidak dapat dilepaskan dari prinsip *good governance*, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi sebagai pilar utama pengelolaan organisasi publik. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi keuangan kepada para pemangku kepentingan, termasuk yayasan, orang tua siswa, dan masyarakat. Akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban atas setiap penggunaan dana sesuai dengan perencanaan dan regulasi yang berlaku. Efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan efisiensi berfokus pada optimalisasi penggunaan sumber daya untuk memperoleh hasil maksimal.

Menurut Bastian (2010) dalam konsep akuntansi sektor publik, pengelolaan keuangan organisasi publik harus berorientasi pada pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (*stakeholders accountability*). Hal ini menegaskan bahwa lembaga pendidikan sebagai entitas publik memiliki kewajiban moral dan administratif untuk menyajikan laporan keuangan yang andal, relevan, dan dapat dipercaya.

Selain itu, dalam perspektif *Stewardship Theory*, pengelola sekolah dipandang sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola sumber daya secara optimal demi kepentingan institusi, bukan semata-mata kepentingan pribadi. Dengan demikian, sistem pengelolaan keuangan yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, karena bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam mekanisme penerbitan *invoice* jasa tenaga kerja *outsourcing* sebagai sarana penagihan piutang usaha. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara sistematis prosedur administrasi, alur verifikasi data, serta praktik pengendalian internal yang diterapkan perusahaan dalam siklus pendapatan. Penelitian tidak berorientasi pada pengujian hipotesis kuantitatif, melainkan pada pemahaman proses operasional dan evaluasi efektivitas sistem yang berjalan.

Penelitian dilaksanakan pada PT Putra Gemilang Terate, khususnya pada bagian Administrasi dan Keuangan yang menangani proses penerbitan *invoice* serta *monitoring* piutang usaha. Pengumpulan data dilakukan selama periode pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Praktek (KKP) pada Februari 2026. Fokus penelitian diarahkan pada alur rekapitulasi absensi dan lembur tenaga kerja *outsourcing*, penyusunan dan verifikasi *invoice*, pencatatan piutang usaha, serta proses *monitoring* pembayaran.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses administrasi, wawancara semi-terstruktur dengan staf administrasi dan bagian keuangan, serta keterlibatan peneliti dalam kegiatan penyusunan *invoice* dan *monitoring* piutang. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen internal perusahaan, seperti rekap absensi, laporan lembur, *draft* dan *invoice* final, berita acara pekerjaan, serta daftar *monitoring* piutang usaha, serta literatur dan penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memahami alur kerja secara langsung, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai prosedur dan kendala yang dihadapi, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai bukti pendukung untuk memperkuat analisis. Data yang telah diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data secara deskriptif, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memastikan konsistensi informasi yang diperoleh.

Metodologi ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas mekanisme penerbitan *invoice* sebagai bagian dari sistem pengendalian internal dan pengelolaan piutang usaha pada perusahaan jasa *outsourcing*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Mekanisme Penerbitan *Invoice* Jasa Tenaga Kerja *Outsourcing*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penerbitan *invoice* jasa tenaga kerja *outsourcing* pada PT Putra Gemilang Terate telah dilaksanakan melalui tahapan administrasi yang sistematis dan terdokumentasi. Proses dimulai dari rekapitulasi absensi tenaga kerja yang ditempatkan pada perusahaan klien. Data absensi diperoleh dari laporan kehadiran harian yang telah diverifikasi oleh koordinator lapangan dan disetujui oleh pihak klien.

Selain absensi reguler, perhitungan lembur dan tunjangan tambahan juga direkap berdasarkan ketentuan dalam kontrak kerja sama. Tahapan ini menjadi dasar utama dalam menentukan nilai tagihan yang akan dicantumkan dalam *invoice*. Setelah rekapitulasi

selesai, bagian administrasi melakukan perhitungan biaya sesuai ketentuan kontrak, termasuk gaji pokok, lembur, biaya manajemen (*management fee*), serta pajak yang berlaku. *Draft invoice* kemudian disusun dan diverifikasi secara internal oleh bagian keuangan sebelum dikirimkan kepada klien.

Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian data dengan kontrak serta meminimalkan risiko kesalahan nominal. Setelah *invoice* diterbitkan dan dikirimkan, transaksi dicatat dalam sistem akuntansi sebagai piutang usaha.

4.2 Pengendalian Internal dalam Penerbitan *Invoice*

Dari sisi pengendalian internal, perusahaan telah menerapkan pemisahan fungsi antara pihak yang merekap data tenaga kerja, penyusun *invoice*, dan pihak yang melakukan pencatatan akuntansi. Pemisahan fungsi ini mendukung prinsip pengendalian internal dalam mencegah kesalahan maupun potensi kecurangan.

Selain itu, dokumen pendukung seperti rekap absensi dan berita acara pekerjaan disimpan sebagai arsip untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur perusahaan telah memenuhi prinsip dokumentasi dan bukti transaksi yang memadai.

4.3 Sistem *Monitoring* Piutang

Meskipun pencatatan piutang telah dilakukan dengan baik, hasil observasi menunjukkan bahwa proses *monitoring* piutang masih dilakukan secara semi-manual melalui daftar *monitoring* sederhana. Tindak lanjut atas *invoice* yang mendekati jatuh tempo masih bergantung pada komunikasi personal dengan klien.

Kondisi ini berpotensi menyebabkan keterlambatan penagihan apabila tidak dilakukan pemantauan secara berkala dan sistematis. Dengan kata lain, mekanisme penerbitan *invoice* telah berjalan efektif, tetapi sistem pengawasan piutang masih memerlukan optimalisasi.

4.4 Perspektif Teori Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal

Dalam perspektif teori sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal, mekanisme yang diterapkan perusahaan telah memenuhi unsur prosedur yang terdokumentasi dan adanya bukti transaksi yang memadai. *Invoice* berfungsi sebagai dokumen sumber dalam siklus pendapatan sekaligus sebagai dasar pengakuan piutang usaha.

Ketepatan penerbitan *invoice* yang didukung oleh dokumen absensi dan kontrak kerja menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip akurasi dan reliabilitas informasi keuangan.

4.5 Dampak terhadap Arus Kas dan Efisiensi Penagihan

Efektivitas mekanisme penerbitan *invoice* berkontribusi terhadap stabilitas arus kas perusahaan. Ketika *invoice* diterbitkan secara tepat waktu dan sesuai kontrak, proses penagihan dapat berjalan lebih lancar dan risiko piutang bermasalah dapat diminimalkan.

Namun, tanpa sistem *monitoring* berbasis digital atau pengingat otomatis, potensi keterlambatan pembayaran tetap menjadi tantangan eksternal yang perlu diantisipasi. Optimalisasi dapat dilakukan melalui pemanfaatan sistem pencatatan terintegrasi atau dashboard *monitoring* piutang yang mampu memberikan notifikasi jatuh tempo secara otomatis, sehingga manajemen dapat mengambil langkah strategis tepat waktu.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa mekanisme penerbitan *invoice* jasa tenaga kerja *outsourcing* pada PT Putra Gemilang Terate telah dilaksanakan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Proses tersebut diawali dengan

rekapitulasi absensi dan lembur tenaga kerja, dilanjutkan dengan perhitungan biaya sesuai kontrak kerja sama, penyusunan *draft invoice*, verifikasi internal, hingga pencatatan sebagai piutang usaha dalam sistem akuntansi. Rangkaian prosedur ini mencerminkan alur administrasi yang jelas serta mendukung penerapan prinsip pengendalian internal perusahaan.

Pemisahan fungsi antara bagian administrasi, keuangan, dan pihak verifikasi turut meminimalkan risiko kesalahan pencatatan maupun potensi kecurangan. Penggunaan dokumen pendukung seperti rekap absensi dan berita acara pekerjaan juga memperkuat aspek akuntabilitas dan transparansi dalam proses penagihan. Secara umum, mekanisme tersebut telah mendukung kelancaran siklus pendapatan dan membantu perusahaan dalam menjaga stabilitas arus kas.

Meski demikian, sistem *monitoring* piutang usaha masih dilakukan secara semi-manual dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem berbasis digital. Kondisi ini berpotensi menyebabkan keterlambatan tindak lanjut penagihan apabila pengawasan tidak dilakukan secara konsisten. Oleh karena itu, meskipun prosedur penerbitan *invoice* telah berjalan efektif, aspek pengelolaan dan pengawasan piutang masih memerlukan peningkatan guna mendukung efisiensi dan keberlanjutan operasional perusahaan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, perusahaan disarankan untuk mengembangkan sistem *monitoring* piutang berbasis digital atau terintegrasi agar dapat memantau jatuh tempo pembayaran secara otomatis dan meminimalkan risiko keterlambatan penagihan. Selain itu, perlu disusun jadwal penagihan (*aging schedule*) yang terstruktur dan terdokumentasi sehingga proses follow up terhadap klien dapat dilakukan secara lebih sistematis dan profesional. Perusahaan juga dapat mempertimbangkan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang lebih rinci mengenai mekanisme *monitoring* piutang dan tindak lanjut penagihan guna memperkuat sistem pengendalian internal. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan penggunaan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed method*) agar efektivitas penagihan piutang dapat diukur secara lebih objektif, misalnya melalui analisis rasio perputaran piutang dan periode penagihan rata-rata. Dengan adanya perbaikan dan pengembangan tersebut, mekanisme penerbitan *invoice* sebagai sarana penagihan piutang usaha diharapkan dapat berjalan lebih optimal, mendukung stabilitas arus kas, serta meningkatkan profesionalisme dan daya saing perusahaan dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, S. N. (2023). Analisis efektivitas siklus pendapatan dalam meminimalkan piutang tak tertagih pada perusahaan jasa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 20(2), 145–158.
- Hamdani. (2024). Pengaruh konsistensi prosedur administrasi dan sistem *monitoring* terhadap efektivitas pengelolaan piutang perusahaan jasa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 23–35.
- Hanafi, M., & Halim, A. (2017). Analisis laporan keuangan. UPP STIM YKPN.
- Kartikasari, D. (2023). Pengaruh sistem *monitoring* piutang berbasis digital terhadap perputaran piutang pada perusahaan jasa. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 9(1), 67–79.
- Kasmir. (2019). Analisis laporan keuangan (Revisi ed.). Rajawali Pers.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate accounting* (17th ed.). Wiley.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2021). *Management information systems: Managing the digital firm* (17th ed.). Pearson.
- Mulyadi. (2016). *Sistem akuntansi* (Edisi ke-4). Salemba Empat.
- Mulyadi. (2019). *Sistem akuntansi* (9th ed.). Salemba Empat.

- Pratama, A. (2022). Evaluasi sistem administrasi *outsourcing* tenaga kerja dalam meningkatkan akurasi penagihan. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 6(3), 201–213.
- Putra, R. M. (2024). Implementasi prosedur verifikasi *invoice* dalam meningkatkan efektivitas penagihan jasa *outsourcing*. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 16(1), 34–46.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2020). *Accounting information systems* (14th ed.). Pearson.
- Rudianto. (2018). *Akuntansi intermediate*. Erlangga.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wardhani, D. K., & Supriyanto, T. (2020). Pengendalian internal pada perusahaan jasa: Studi kasus mekanisme penagihan piutang. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 7(2), 115–126. <https://doi.org/10.1234/jasi.v7i2.2020>
- Yuliana, R., & Prasetyo, H. (2018). Manajemen piutang usaha dan arus kas perusahaan. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 5(1), 45–58.
- Yuliani, Y., & Reviandani, W. (2024). Peran sistem pengendalian internal dalam pengelolaan piutang perusahaan *outsourcing*. *Jurnal Akuntansi dan Audit Indonesia*, 28(1), 55–68.
- Zahura, T. (2024). Analisis kelemahan verifikasi *invoice* dalam sistem pengendalian internal perusahaan jasa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 19(2), 112–125.
- Zulfan, Z., & Lestari, P. (2021). Evaluasi sistem informasi akuntansi untuk perusahaan *outsourcing*. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi*, 6(3), 77–88.